

Keterikatan Tempat Berdasarkan Tipe Tindakan Menetap Masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin

Place Attachment Based on Settlement Action Types of the Bajo People in Pulau Bungin

Alvito Cakra Baskara¹, Surjono¹, Wara Indira Rukmi¹

Diterima: 3 Juni 2025

Disetujui: 8 Oktober 2025

Abstrak: Penelitian ini menelaah keterikatan tempat (*place attachment*) masyarakat Bajo di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, yang dikenal sebagai pulau terpadat di dunia. Kepadatan ekstrem dan wacana relokasi dari pemerintah menimbulkan pertanyaan bagaimana keterikatan masyarakat dapat bertahan lintas generasi. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat keterikatan tempat dan menilai bagaimana keterikatan tersebut diwujudkan dalam tindakan masyarakat. Metode yang digunakan adalah *mixed-methods* dengan 157 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin dan teknik *purposive*, sehingga mewakili beberapa kelompok lama tinggal. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan dilengkapi interpretasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan indeks afektif dan konatif berada pada kategori tinggi pada semua kelompok, dengan ikatan yang berakar pada hubungan leluhur, identitas kolektif, serta praktik rekonstruksi ruang. Analisis kualitatif menegaskan bahwa Pulau Bungin dipandang sebagai tanah warisan dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengaitan keterikatan afektif dan konatif dengan adaptasi ruang dalam konteks permukiman padat pesisir. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan penataan kawasan dan program hunian hanya akan efektif bila mengintegrasikan identitas budaya dan ikatan emosional masyarakat.

Kata Kunci: Keterikatan Tempat, Suku Bajo, Pulau Bungin

Abstract: This study examines the place attachment of the Bajo community in Bungin Island, Sumbawa Regency, recognized as the most densely populated island in the world. Extreme density and government-led relocation plans raise the question of how attachment persists across generations. The objective of this research is to measure the level of place attachment and to assess how such attachment is manifested through community actions. A mixed-methods approach was applied, involving 157 respondents selected using Slovin's formula with purposive sampling to represent different cohorts of residence length. Data were collected through Likert-scale questionnaires and in-depth interviews, then analyzed using descriptive quantitative methods complemented by qualitative interpretation. The results indicate high affective and conative indices across all groups, with strong bonds rooted in ancestral ties, collective identity, and spatial reconstruction practices. Qualitative evidence reinforces that Bungin Island is perceived as ancestral land and an inseparable part of community life. The novelty of this study lies in linking affective and conative attachment with spatial adaptation in the context of dense coastal settlements. The findings highlight that planning policies and housing programs will only be effective if they integrate cultural identity and emotional bonds of the community.

Keywords: Place Dependence, Bajo Tribe, Bungin Island

¹ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

Korespondensi: alvitobaskara@student.ub.ac.id

PENDAHULUAN

Suatu lingkungan permukiman dapat dipengaruhi oleh beberapa elemen dalam pembentukannya. Menurut Doxiadis (1968) *nature, man, society, shells*, dan *network* merupakan elemen-elemen pembentuk permukiman (Astita, 2025; Doxiadis, 1968; Doxiadis, 1970). Selain itu, aspek budaya juga turut serta dalam pembentukan lingkungan permukiman, dimana terbentuknya lingkungan permukiman terjadi karena hunian menjadi wadah fungsional yang didasari pada pola aktivitas manusia serta pengaruh rona lingkungan, baik yang bersifat fisik ataupun non fisik/budaya (Wulandari, et al., 2016). Aspek budaya seperti tradisi atau kebiasaan akan menyebabkan lingkungan permukiman memiliki karakter yang khas (Warsito, 2015). Lingkungan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan hubungan emosional, fungsional, dan kognitif penduduk terhadap tempat tinggal mereka (Li et al., 2025).

Keterikatan tempat atau *place attachment* memiliki kontribusi dalam membentuk, merawat, dan menjaga identitas serta harga diri individu, kelompok, atau budaya (Widodo et al., 2019). Keterikatan tempat adalah ikatan afektif (mencakup watak perilaku seperti perasaan) yang dikembangkan orang atau kelompok terhadap tempat tertentu. Keterikatan tempat pada suatu lingkungan mengacu pada pengalaman hidup warga dengan lingkungan mereka dari waktu ke waktu (Pan & Cobbinah, 2023). Keterikatan tempat akan semakin kuat ketika tempat tersebut menyediakan kebutuhan fungsional dan emosional penghuninya, seperti sarana dan prasarana serta bahan baku (Manzo & Perkins, 2006). Konsep ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat bertahan dan beradaptasi meskipun menghadapi tekanan lingkungan maupun kebijakan pembangunan.

Suku Bajau atau Bajo adalah salah satu suku di Indonesia yang memiliki keterikatan erat terhadap laut. Suku Bajo sejak zaman dahulu terbiasa hidup di atas perahunya atau termasuk dalam kaum nomaden (Poedjowibowo, 2016). Namun seiring perkembangan zaman, Suku Bajo mulai menetap dengan membangun permukiman di gugusan karang atau di laut dangkal. Suku Bajo tersebar di banyak wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Rahmat & Usman, 2016).

Di Nusa Tenggara Barat, tempat tinggal Suku Bajo yang terkenal berada di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa. Diperkirakan Suku Bajo bermigrasi dari Sulawesi Selatan ke pulau ini sekitar ratusan tahun yang lalu (Marjanto & Syaifuddin, 2013). Bertahun-tahun Pulau Bungin terus mengalami perkembangan dari aspek fisik dan non fisik (budaya). Berbagai literatur menyebut bahwa Pulau Bungin adalah pulau terpadat di dunia, walaupun hal itu masih harus ditelusuri lebih lanjut (Efendi & Baiquni, 2022; Islamiah, 2024; Kurniawan, 2024; Marjanto & Syaifuddin, 2013; Mulyan, 2020; Nurmawanti & Rahman, 2024; Pattaray et al., 2024; Taufiqurrahman & Ali, 2023; Utari et al., 2024). Namun demikian, kepadatan Pulau Bungin menyebabkan pulau ini tidak memiliki ruang terbuka hijau, lahan kosong, hingga garis pantai dikarenakan masyarakat Suku Bajo yang terus membangun rumah di sepanjang garis pantai (Khaerunnisa, 2022). Masyarakat setempat terus aktif dalam upaya memperluas wilayah yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat (Mulyan, 2020). Perluasan wilayah ini dipengaruhi oleh tradisi unik yang dimiliki Suku Bajo, dimana seorang pemuda harus mengumpulkan batu karang jika hendak menikah, yang kemudian akan ditumpuk di sisi pulau yang telah ditetapkan. Penetapan wilayah biasanya di tempat yang berdekatan dengan rumah orang tua atau kerabat terdekat (Lahamendu et al., 2022). Perlu disadari Meskipun Suku Bajo memiliki aturan untuk menjaga terumbu karang, penduduk di Pulau Bungin justru memanfaatkan karang yang sudah mati untuk memperluas lahan mereka (Taufiqurrahman & Ali, 2023). Dalam konteks kepadatan ekstrem yang melekat pada Pulau Bungin, studi ini melihat bagaimana dimensi spasial hunian atau permukiman menjadi salah satu kunci. Hal ini tidak terlepas dari keterikatan kultural dan historis masyarakat Suku Bajo yang begitu mendalam terhadap pulau ini yang

kemudian termanifestasi dalam pola pembangunan permukiman mereka yang unik dan terus-menerus.

Rencana penataan kawasan pesisir Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa telah menjadi fokus utama Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025). Hal ini mengindikasikan upaya serius pemerintah untuk mengubah wajah pesisir Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Brilian, 2025). Wamen Fahri secara spesifik menyoroti kebutuhan perbaikan permukiman nelayan yang kumuh dan tidak layak dengan rencana pembangunan rumah susun (Laksono, 2025). Namun ditengah semangat penataan dan pengembangan ekonomi, masyarakat Pulau Bungin menyampaikan aspirasinya. Mereka mengungkapkan bahwa "mereka ingin berkembang layaknya ikan, namun tetap dalam habitatnya sendiri" (Pulau Sumbawa News, 2025). Hal ini dengan jelas menegaskan keinginan agar pengembangan Pulau Bungin tetap mempertahankan identitas mereka.

Aspirasi ini secara kuat menggarisbawahi mengapa *place dependance* menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program penataan. Sebagai pulau terpadat di dunia dengan karakteristik sosial-budaya yang unik, perubahan signifikan pada lingkungan fisik berpotensi besar mempengaruhi ikatan emosional dan identitas masyarakat dengan tempat tinggal mereka (Anton & Lawrence, 2016). Apalagi, Pulau Bungin sendiri telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 dan RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 sebagai prioritas pengembangan kawasan wisata budaya. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan rencana penataan, kajian mendalam tentang *place dependance* diperlukan. Intervensi pembangunan harus secara cermat diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar dan memperkuat rasa kepemilikan serta koneksi emosional masyarakat terhadap Pulau Bungin (Suaib & Zulhijjah, 2024). Tanpa pemahaman dan pelibatan aspek *place dependance*, penataan ini berisiko menciptakan pembangunan yang sekedar indah secara fisik namun rapuh secara sosial dan budaya, bahkan kehilangan esensi identitas lokal yang seharusnya menjadi daya tarik utamanya.

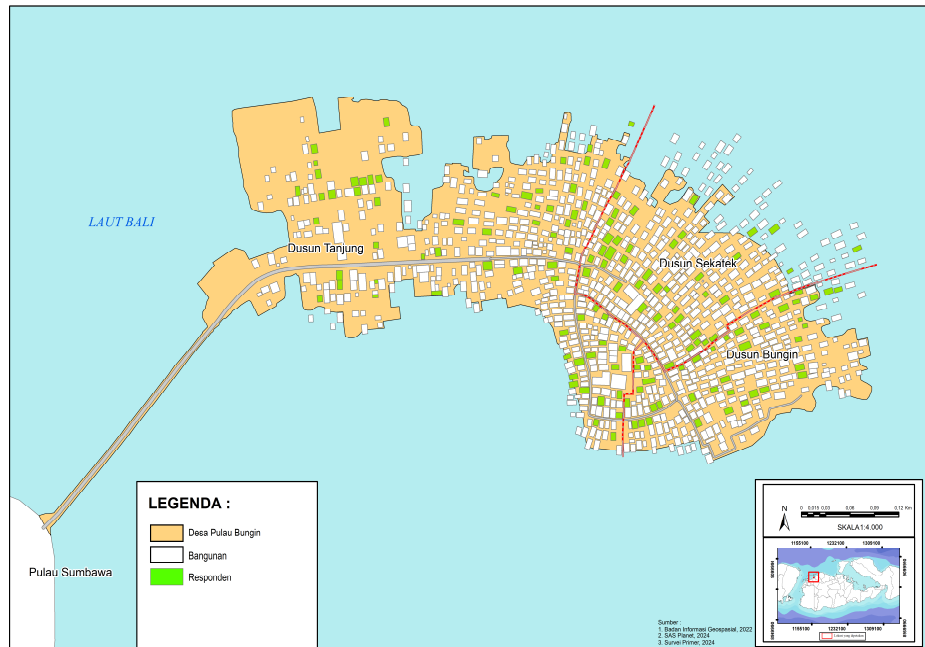
Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat keterikatan tempat masyarakat Bajo di Pulau Bungin serta menganalisis bagaimana keterikatan tersebut diwujudkan melalui tiga bentuk tindakan utama: menjaga kedekatan, keinginan menetap, dan rekonstruksi tempat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap dimensi konatif dalam konteks permukiman padat pesisir, serta kontribusinya terhadap wacana perencanaan kawasan berbasis budaya dan identitas komunitas.

METODE

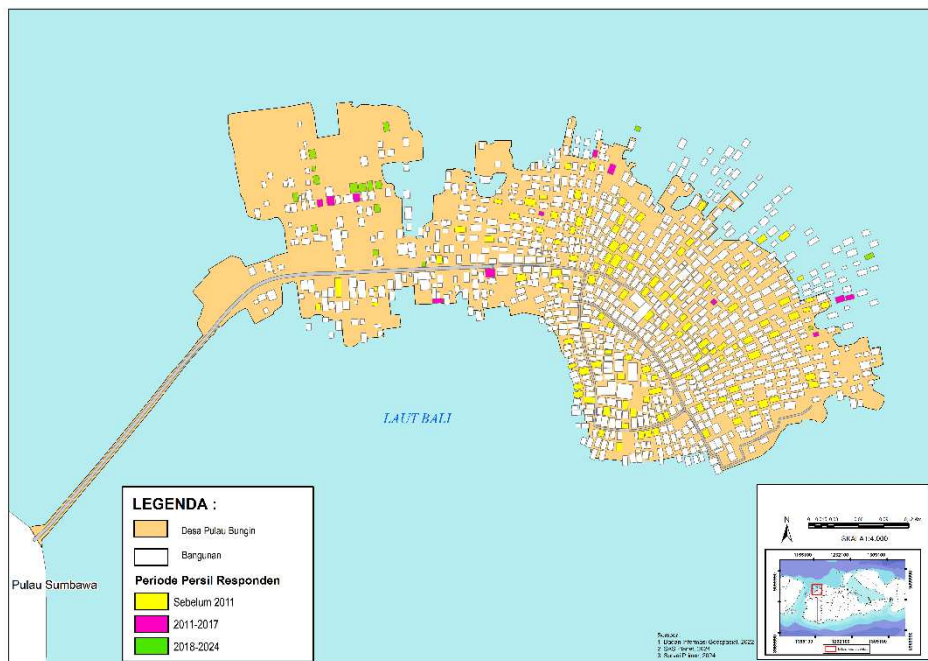
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*). Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk di Pulau Bungin yang berjumlah 3.665 jiwa pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel yang ditoleransi sebesar 10%. Hasilnya didapat sampel sebanyak 157 responden dengan kriteria bersuku Bajo dan memiliki hunian di Pulau Bungin. Persil responden secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada penelitian ini, responden dikelompokkan berdasarkan lama tinggal untuk membandingkan keterikatan tempat antar generasi. Periode lama tinggal dibagi menjadi tiga kategori: sebelum 2011, antara 2011–2017, dan setelah 2018. Rentang tahun tersebut ditentukan dengan merujuk pada kejelasan citra satelit yang tersedia, sehingga memudahkan penelusuran perubahan fisik permukiman dalam beberapa dekade terakhir. Dengan cara ini, penelitian dapat melihat apakah keterikatan hanya dimiliki oleh generasi lama atau juga

terbentuk pada generasi yang lebih baru. Penelitian ini termasuk *non-probability sampling* karena sampel tidak diambil secara acak, melainkan difokuskan pada kelompok masyarakat yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Persebaran periode persil tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1. Peta Desa Pulau Bungin



Gambar 2. Peta Sebaran Periode Persil Responden Desa Pulau Bungin

Kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang angka 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner ditanyakan secara langsung yang berisi pertanyaan terkait dengan indikator *place dependance*. (Tabel 1)

Tabel 1. Indikator *Place Dependance*

No	Indikator	Data Deskriptif	Sumber
1	Menjaga kedekatan (tindakan untuk melakukan apa saja untuk tetap berada pada Pulau Bungin)	Tindakan yang akan/telah dilakukan responden di Pulau Bungin	Saputra et al., 2022; Scannell & Gifford, 2010; Sera, 2025
2	Keinginan menetap (Penilaian seberapa besar keinginan untuk menetap di Pulau Bungin)	- Alasan mau menetap/direlokasi	
3	Rekonstruksi tempat (Penilaian seberapa besar keinginan untuk membangun kembali Pulau Bungin seperti sedia kala jika terdampak bencana)	- Tujuan relokasi Alasan tetap ingin lingkungan seperti semula	

Analisis indeks adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis tingkat ketergantungan fungsional masyarakat Suku Bajo terhadap Pulau Bungin berdasarkan dimensi indikator *place dependance*. Skala yang digunakan adalah skala ordinal yang kemudian diukur menggunakan skala Likert dalam rentang angka 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju). Kemudian, nilai yang sudah dihitung dapat dibagi menjadi tiga kelas sesuai dengan kaidah *three box method*. Kaidah ini digunakan sebagai dasar interpretasi nilai dan mempermudah pemahaman. Rentang kelas diperoleh dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Mengacu pada Nilai Indeks Indikator dan skala Likert, maka nilai terendah adalah 20 dan tertinggi adalah 100, sehingga rentang yang dihasilkan bernilai 80. Nilai 80 ini dibagi menjadi tiga kelas yang akan menghasilkan rentang kelas 26,6. Selain itu, analisis dilakukan secara agregat dan dibedakan menurut kelompok lama tinggal untuk melihat konsistensi antar generasi.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan jawaban terbuka dan hasil wawancara, yang kemudian digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap hasil kuantitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menunjukkan tidak hanya angka keterikatan, tetapi juga makna dan alasan di balik tindakan masyarakat dalam mempertahankan kedekatan dengan Pulau Bungin.

$$\text{Nilai indeks indikator} = \frac{F}{5} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Nilai indeks Konatif} = \frac{\sum \text{Nilai indeks aspek}}{\text{Jumlah aspek}} \quad (2)$$

F = skor nilai (skala Likert) yang dipilih responden

Tabel 2. Rentang Kelas Skor

Rentang Kelas Skor	Data Deskriptif
20,00 – 46,66	Rendah
46,67 – 73,33	Sedang
73,34 – 100,00	Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan kepada masyarakat Suku Bajo, keseluruhan masyarakat memiliki indeks konatif yang tinggi, yaitu sebanyak 157 orang. Tidak terdapat masyarakat dengan indeks konatif sedang dan ataupun rendah. Indeks konatif ini mencerminkan bagaimana niat atau kecenderungan tindakan masyarakat Suku Bajo

terkait keterikatan mereka terhadap Pulau Bungin. Indeks ini mengukur seberapa besar keinginan atau rencana mereka untuk tetap tinggal, menjaga kedekatan, atau bahkan terlibat dalam upaya mempertahankan lingkungan dan kehidupan di Pulau Bungin. Semakin tinggi indeks konatif, semakin rendah keinginan masyarakat untuk meninggalkan Pulau Bungin.

Tabel 3. *Place Dependence* Masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin

	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Mean	Median	Indeks Konatif
Menjaga Kedekatan	60%	100%	99%	100%	Tinggi
Keinginan Menetap	60%	100%	94%	100%	Tinggi
Rekonstruksi Tempat	80%	100%	100%	100%	Tinggi

Berdasarkan penghitungan dengan skala Likert, semua indikator konatif menunjukkan skor lebih dari 80 persen. Dapat dilihat pada Tabel 3. Menurut pendekatan *three-box method*, nilai di atas 80 persen masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 60–79 persen tergolong sedang, dan di bawah 60 persen tergolong rendah. Karena seluruh hasil berada pada kategori tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa keterikatan konatif masyarakat Bajo di Pulau Bungin sangat kuat dan merata pada semua responden.

Tabel 4. *Place Dependence* Masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin Berdasarkan Periode Lama Tinggal

	Menjaga Kedekatan	Keinginan Menetap	Rekonstruksi Tempat	Mean	Indeks Konatif
Sebelum 2011	100%	94%	100%	98%	Tinggi
Antara 2011–2017	98%	94%	100%	97%	Tinggi
Setelah 2018	100%	100%	99%	100%	Tinggi

Jika dibedakan menurut lama tinggal, hasilnya relatif seragam dapat dilihat pada Tabel 4. Responden yang tinggal di Pulau Bungin sejak sebelum 2011 memiliki indeks keterikatan konatif sebesar 98 persen. Kelompok yang mulai tinggal antara tahun 2011–2017 menunjukkan indeks 97 persen, sementara kelompok yang datang setelah 2018 memiliki indeks 100 persen. Perbedaan antar kelompok ini sangat tipis, sehingga dapat disimpulkan bahwa lamanya tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat keterikatan konatif.

Temuan ini menunjukkan bahwa keterikatan konatif tidak hanya diwariskan oleh generasi lama yang sejak awal menetap di Pulau Bungin, tetapi juga dialami oleh generasi yang lebih baru. Bahkan penduduk yang relatif baru tinggal pun sudah memiliki ikatan kuat untuk tetap menetap, menjaga kedekatan, dan melakukan rekonstruksi ruang di pulau tersebut. Artinya, keterikatan konatif lebih banyak ditentukan oleh identitas budaya dan ikatan sosial masyarakat Bajo daripada sekadar faktor durasi tinggal.

Menjaga Kedekatan

Menjaga kedekatan memiliki indeks yang tinggi. Menjaga kedekatan diartikan sebagai tindakan untuk melakukan apa saja untuk tetap berada pada suatu tempat bahkan jika harus menempatkan diri sendiri dalam bahaya (Scannell & Gifford, 2010). Beberapa upaya yang diungkapkan oleh masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin dalam upaya menjaga kedekatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator *Place Dependence*

Upaya	Jumlah Responden	Persentase (%)
Menolak ajakan istri untuk pindah	1	0.6
Tidak ada	2	1.3
Tergantung nasib	1	0.6
Akan tetap tinggal di sini	1	0.6
Memilih orang Bungin sebagai pasangan	3	1.9
Pulang cepat kalau lagi di luar Pulau Bungin	149	94.9
Jumlah	157	100

Upaya yang mendominasi adalah keinginan masyarakat Suku Bajo untuk secepatnya kembali ke Pulau Bungin, dimana 94,9% responden mengungkapkan hal ini. Pada pembahasan subbab Makna, terdapat hal-hal yang membekas di diri masyarakat Suku Bajo, yakni masyarakatnya, alamnya, dan lingkungannya. Ketiga hal ini adalah alasan mereka untuk kembali. Salah satu responden mengungkapkan jika beliau sering ikut lomba mancing ke luar negeri namun tetap di kepalanya hanya ingin balik ke Pulau Bungin. Hal ini mencerminkan dimensi "*proximity-maintaining*" dalam keterikatan tempat, yaitu dorongan emosional untuk tetap dekat dengan tempat yang memiliki makna personal dan sosial (Inalhan et al., 2021).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori identitas tempat (*place identity*), di mana tempat menjadi bagian integral dari identitas diri seseorang (Ernawati, 2011; Peng et al., 2020). Sebagaimana diungkapkan Proshansky (1978), identitas tempat adalah "dimensi-dimensi diri yang mendefinisikan identitas personal individu dalam kaitannya dengan lingkungan fisik melalui pola kompleks ide-ide, perasaan, nilai-nilai, tujuan, preferensi, keterampilan, dan kecenderungan perilaku sadar dan tidak sadar yang relevan dengan lingkungan tertentu" (Peng et al., 2020; Proshansky, 1978). Bagi masyarakat Suku Bajo, Pulau Bungin telah bertransformasi menjadi representasi identitas komunal dan personal mereka. Hal-hal yang membekas seperti masyarakatnya, alamnya, dan lingkungannya, yang diungkapkan responden, merupakan elemen kunci yang membentuk identitas kolektif dan individu mereka. Bahkan, narasi seorang responden yang sering berpartisipasi dalam kompetisi memancing ke luar negeri namun tetap mendambakan kembali ke Pulau Bungin, menggarisbawahi bahwa ikatan tempat ini melampaui batasan geografis dan fungsional semata. Hal ini sejalan dengan penelitian Scannell & Gifford (2016) yang menunjukkan bahwa visualisasi tempat yang melekat dapat meningkatkan rasa memiliki, harga diri, dan makna dalam hidup (Scannell & Gifford, 2016). Ikatan tempat ini melibatkan ikatan pengalaman secara positif, yang tumbuh seiring waktu dari ikatan perilaku, afektif, dan kognitif antara seseorang dan/atau kelompok dengan lingkungan sosial dan fisiknya (Ernawati, 2011).

Fenomena menjaga kedekatan ini juga berimplikasi pada praktik adaptasi ruang. Misalnya, keluarga menimbun karang untuk memperluas lahan ketika ada anggota baru yang menikah, sehingga tetap bisa tinggal berdekatan di Pulau Bungin. Praktik ini memperlihatkan bahwa dorongan untuk selalu dekat bukan hanya perasaan, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata yang memengaruhi perubahan fisik pulau.

Fenomena serupa ditemukan pada komunitas Togoru di Fiji, di mana keterikatan terhadap tanah leluhur dan ekosistem lokal mendorong penduduk untuk tetap tinggal meskipun menghadapi risiko perubahan iklim. Keterikatan ini berakar pada identitas budaya dan sejarah kolektif yang kuat (Yee et al., 2022).

Keinginan Menetap

Indeks keinginan menetap cukup tinggi. Keinginan menetap diartikan sebagai seberapa besar kemungkinan individu akan berpindah dari tempat yang sedang ditinggali sekarang menuju tempat lain (Scannell & Gifford, 2010). Tempat lain ini adalah tempat selain dari Pulau Bungin.

Alasan lain yang memperkuat penolakan relokasi adalah profesi mayoritas masyarakat sebagai nelayan. Ketergantungan ekonomi ini secara intrinsik terhubung dengan lingkungan laut di sekitar Pulau Bungin. Relokasi akan mengancam mata pencarian mereka, sebuah faktor penting dalam keputusan untuk tetap bertahan di suatu tempat (Yee et al., 2022). Ungkapan dramatis seperti "hidup dan mati mereka hanya di Pulau Bungin" dan "kalau dipindahkan ke daratan (tempat lain) bisa mati" menunjukkan tingkat keterikatan yang ekstrem, menggambarkan Pulau Bungin sebagai "separuh jiwa" mereka. Hal ini menggambarkan sebuah bentuk *place-belongingness*, di mana ada "perasaan afiliasi dengan suatu tempat, ikatan sosial di mana orang merasa terhubung dan memiliki keanggotaan dengan suatu lingkungan" (Yee et al., 2022). Keterikatan tempat yang kuat ini dapat menciptakan keengganan untuk meninggalkan tempat-tempat yang rentan secara lingkungan, dan dapat dianggap sebagai "separuh jiwa" mereka. Dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 6.

Tabel 6. Keinginan Menetap Masyarakat Suku Bajo dari Pulau Bungin

Alasan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Karena pekerjaan di sini	1	0.6
Kalau pindah ke daratan bisa mati	1	0.6
Tergantung lokasi	3	1.9
Sudah nyaman	3	1.9
Mata pencaharian di sini	1	0.6
Karena ada rumah yang telah dibangun sendiri di sini	1	0.6
Tidak mau bahkan jika direlokasi ke luar negeri	1	0.6
Tergantung, apakah penghasilan di tempat baru memadai	3	1.9
Ikut pemerintah	6	3.8
Karena hidup dan mati saya di Pulau Bungin	10	6.4
Karena di sini mayoritas nelayan	11	7.0
Tidak mau, bahkan saya menolak pindah ke kampung suami	2	1.3
Karena suami diam di sini	3	1.9
Jika ada uang ganti rugi	10	6.4
Tanah kelahiran	43	27.4
Tanah nenek moyang	58	36.9
Jumlah	157	100

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian kecil responden menyatakan ketertarikan terhadap opsi relokasi, yaitu sebanyak 22 orang dari total 157 responden. Dari jumlah tersebut, 9 orang berasal dari kelompok yang mulai tinggal sekitar tahun 2010, 1 orang dari kelompok setelah 2018, dan 2 orang dari kelompok baru tahun 2024. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat menolak relokasi, ada variasi tingkat keterikatan di kalangan generasi yang lebih baru. Namun demikian, secara keseluruhan indeks konatif tetap berada pada kategori tinggi pada semua kelompok, sehingga keterikatan terhadap Pulau Bungin dapat dikatakan bersifat lintas generasi.

Indeks keinginan untuk menetap yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bajo memiliki sedikit kemungkinan untuk berpindah dari Pulau Bungin ke tempat lain. Mayoritas responden secara tegas menolak relokasi, dengan alasan utama bahwa Pulau Bungin adalah tanah nenek moyang dan tanah kelahiran mereka. Penolakan ini menegaskan kuatnya dimensi historis dan genealogis dengan tempat, di mana individu secara signifikan mengidentifikasi diri dengan kelompok budaya mereka dan mewarisi nilai-nilai tertentu

(Yee et al., 2022). Keterikatan tempat juga dapat diperkuat oleh warisan budaya dan sejarah keluarga yang turun-temurun. Hal ini sejalan dengan temuan pada masyarakat Togoru di Fiji, yang resisten terhadap relokasi karena ikatan leluhur dan historis dengan tanah dan masyarakatnya, termasuk tempat pemakaman nenek moyang mereka. Keterikatan tempat yang kuat dapat mengurangi persepsi risiko dan menurunkan kecenderungan untuk relokasi, bahkan dalam situasi bencana. Hal ini menekankan pentingnya memahami keterikatan emosional terhadap tempat dalam perencanaan relokasi (Carone et al., 2025). Contoh nyata dapat dilihat pada relokasi komunitas Newtok di Alaska, di mana kegagalan dalam mempertahankan elemen budaya dan lingkungan asli menyebabkan ketidakpuasan dan tantangan dalam adaptasi di lokasi baru (Bowmer & Thiessen, 2024; Schwing & Adams, 2025).

Walaupun jawaban mayoritas adalah penolakan terkait relokasi, namun beberapa responden nampak memikirkan kembali tawaran tersebut. Terdapat 22 responden yang memberikan jawaban tertarik mengenai wacana relokasi. Jawaban seperti "tergantung lokasi", "jika ada uang ganti rugi", dan "ikut pemerintah" adalah bukti bahwa tidak sepenuhnya masyarakat benar-benar mampu terikat pada suatu tempat. Jawaban-jawaban tersebut dilanjutkan dengan pertanyaan berupa "kemana anda ingin direlokasi?". Berikut merupakan tujuan relokasi yang dikemukakan bagi mereka yang tertarik terhadap wacana relokasi (Tabel 7).

Tabel 7. Tujuan Relokasi Masyarakat Suku Bajo dari Pulau Bungin

Tujuan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Daratan	1	4.5
Ikut pemerintah	3	13.6
Lokasi yang strategis	5	22.7
Yang dekat laut	3	13.6
Tidak kepikiran	10	45.5
Jumlah	22	100

Jawaban-jawaban yang dikemukakan tidak mengerucutkan kepada lokasi yang spesifik. Mereka hanya menyebutkan kriteria-kriteria yang diinginkan jika memang akan direlokasi. Jawaban yang mendominasi justru mereka tidak kepikiran untuk direlokasi kemana. Namun yang jelas, mereka memiliki keinginan terpendam untuk merasakan kehidupan selain di Pulau Bungin.

Rekonstruksi Tempat

Rekonstruksi tempat diartikan sebagai membangun kembali lingkungan yang familiar dinilai lebih penting daripada harus mengatasi permasalahan perencanaan (Scannell & Gifford, 2010). Rekonstruksi tempat terdiri dari seberapa besar keinginan agar lingkungan yang terdampak kerusakan untuk dibangun seperti sedia kala dan bila lingkungan tersebut diperbaiki dan menyelesaikan permasalahan perencanaan, apakah anda akan tetap agar lingkungan tersebut kembali seperti semula. Didapatkan jawaban mengenai alasan masyarakat jika lingkungan tersebut diperbaiki ataupun tidak diperbaiki sebagai berikut (Tabel 8).

Tabel 8. Rekonstruksi Tempat di Pulau Bungin

Alasan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Agar ada perbaikan	2	1.3
Karena banyak kenangannya	1	0.6
Karena rumah panggung sudah paling cocok	64	40.8
Sudah nyaman dengan lingkungan seperti ini	90	57.3
Jumlah	157	100

Mayoritas responden tidak menginginkan adanya perubahan dari lingkungan yang sekarang mereka tempati. Jika terjadi kerusakan atau bencana alam, lingkungan yang telah hancur harus dikembalikan seperti sedia kala dan harus berupa rumah panggung (jika yang rusak adalah rumah tinggal). Rumah panggung dianggap sudah paling cocok dan sesuai untuk kehidupan tepi laut. Beberapa rumah di Pulau Bungin dibangun di atas laut, sehingga rumah panggung merupakan jawaban yang sesuai. Rumah panggung juga dapat menjadi jawaban apabila air laut sedang pasang. Rumah panggung juga sesuai dengan angin laut, Masyarakat Suku Bajo sudah nyaman dengan apa yang telah mereka miliki dan bangun seperti terlihat pada Gambar 3. Keinginan untuk mempertahankan desain tradisional ini juga dapat diartikan sebagai bentuk *place-congruent continuity* (Twigger-Ross & Uzzell, 1996), di mana keselarasan antara lingkungan dan keinginan serta nilai-nilai masyarakat setempat menghasilkan rasa makna dalam hidup (Ernawati, 2011; Twigger-Ross & Uzzell, 1996). Terdapat dua jawaban yang menginginkan perbaikan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Perbaikan yang dimaksud adalah seperti membangunnya menjadi konstruksi yang lebih kokoh (rumah batu bata).



Gambar 3. Rumah Panggung di Pulau Bungin

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kerangka hukum bahwa garis sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang harus dijaga dari pembangunan fisik yang berpotensi merusak fungsi ekosistem. Prinsip ini menjadi penting mengingat Pulau Bungin, dengan tingkat kepadatan yang ekstrem, telah melakukan ekspansi lahan melalui penimbunan karang untuk menambah hunian baru. Praktik ini mencerminkan dilema kebijakan: di satu sisi, masyarakat memiliki keterikatan konatif yang sangat tinggi sehingga memilih bertahan di pulau; di sisi lain, ekspansi ruang hunian berpotensi melanggar prinsip perlindungan sempadan pantai yang diatur secara hukum.

Pratikto (2003) menekankan bahwa wilayah pesisir di Indonesia menghadapi tiga tekanan utama: pertama, tekanan populasi yang menimbulkan konversi ruang pesisir menjadi kawasan permukiman; kedua, kerusakan ekosistem akibat pengambilan karang, reklamasi, dan penebangan mangrove; dan ketiga, ketidakpastian hukum yang membuat pengendalian ruang sulit dilakukan. Jika dikaitkan dengan Pulau Bungin, tiga aspek ini terlihat nyata: laju pertumbuhan hunian menekan ruang terbatas, ekspansi melalui penimbunan karang menurunkan kualitas ekosistem, dan praktik ini berjalan meski berlawanan dengan ketentuan sempadan pantai (Pratikto, 2003). Temuan ini menegaskan relevansi peringatan Pratikto bahwa pemanfaatan ruang pesisir kerap berjalan di luar kendali tata ruang formal.

Lebih lanjut, bahwa penataan ruang pesisir tidak dapat hanya menitikberatkan pada aspek ekologi, melainkan harus menyeimbangkan dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi (Utami, 2021). Kasus Pulau Bungin memperlihatkan dominasi aspek sosial, berupa ikatan

budaya dan identitas masyarakat Bajo, yang bahkan mengalahkan kepentingan ekologis. Keputusan masyarakat untuk tetap tinggal, meskipun menimbulkan tekanan pada lingkungan, dapat dipahami sebagai bentuk orientasi sosial dan ekonomi yang berbeda dengan logika kebijakan ekologis. Penataan ruang di Bungin karenanya tidak bisa dipaksakan dalam kerangka ekologis semata, tetapi harus mencari titik temu antara keberlanjutan ekosistem dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Marliana (2021) menguatkan argumen ini dengan menekankan bahwa partisipasi masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan kebijakan pesisir. Menurutnya, banyak kebijakan tata ruang pesisir yang gagal karena bersifat *top-down*, tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kearifan lokalnya (Marliana et al., 2021). Pulau Bungin merupakan contoh nyata: masyarakat menolak relokasi bukan sekadar karena faktor ekonomi, tetapi karena keterikatan konatif yang berakar pada sejarah, identitas, dan praktik rekonstruksi ruang yang diwariskan antargenerasi. Kebijakan yang tidak mengakomodasi dimensi ini akan sulit diterapkan. Oleh sebab itu, strategi penataan ruang di Bungin perlu diarahkan ke pendekatan partisipatif, dengan mengintegrasikan nilai budaya dan keterikatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pesisir.

Dengan mengacu pada kerangka UU 27/2007 serta pandangan Pratikto, Utami, dan Marliana, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pesisir di Pulau Bungin menghadapi dilema ganda: bagaimana melindungi sempadan pantai dan ekosistem pesisir, sambil tetap mengakui keterikatan budaya masyarakat Bajo yang enggan meninggalkan ruang hidupnya. Pendekatan yang menyeimbangkan ekologi, sosial, dan ekonomi, serta berbasis partisipasi masyarakat, menjadi strategi yang paling memungkinkan untuk menjaga keberlanjutan Pulau Bungin sebagai permukiman unik dengan kepadatan tertinggi di dunia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterikatan konatif masyarakat Bajo di Pulau Bungin berada pada kategori tinggi pada semua indikator, baik dalam menjaga kedekatan, keinginan menetap, maupun rekonstruksi tempat. Analisis per kelompok lama tinggal memperlihatkan hasil yang relatif seragam, sehingga keterikatan konatif dapat dikatakan melintasi generasi. Bahkan penduduk baru sekalipun menunjukkan ikatan yang sama kuatnya dengan masyarakat lama. Hal ini menegaskan bahwa keterikatan konatif tidak hanya terbentuk dari durasi tinggal, tetapi lebih dalam berakar pada identitas budaya dan sosial masyarakat Bajo.

Temuan kualitatif memperkuat hal tersebut. Ungkapan dramatis seperti “hidup mati di Pulau Bungin” serta praktik penimbunan karang untuk hunian anak yang menikah menunjukkan bahwa keterikatan tempat tidak hanya berupa preferensi, tetapi telah menjadi bagian dari identitas komunal. Praktik rekonstruksi ruang melalui rumah panggung juga memperlihatkan kontinuitas budaya, meskipun pada saat yang sama menimbulkan tekanan terhadap ekosistem pesisir.

Hasil ini menghadirkan dilema bagi kebijakan tata ruang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan perlindungan sempadan pantai, sementara keterikatan konatif mendorong masyarakat untuk terus memperluas hunian di kawasan pesisir. Sebagaimana ditegaskan Pratikto, tekanan populasi di wilayah pesisir sering melampaui daya dukung; Utami menekankan perlunya keseimbangan antara ekologi, sosial, dan ekonomi; dan Marliana menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pesisir. Penelitian ini menegaskan bahwa kasus Pulau Bungin merupakan contoh nyata dari ketiga hal tersebut: keterikatan sosial yang kuat mendorong penggunaan ruang yang menekan ekologi, dan kebijakan akan sulit diterapkan tanpa melibatkan masyarakat lokal.

Novelty penelitian ini terletak pada penemuan bahwa keterikatan konatif masyarakat Bajo di Pulau Bungin bersifat lintas generasi, terwujud melalui praktik rekonstruksi ruang yang khas, dan memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan tata ruang pesisir. Temuan ini memberi kontribusi pada literatur *place attachment* dengan menekankan pentingnya dimensi konatif dalam konteks permukiman padat di pulau kecil, serta memberikan masukan praktis bagi perencanaan pesisir yang partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, C. E., & Lawrence, C. (2016). The Relationship Between Place Attachment, The Theory Of Planned Behaviour And Residents' Response To Place Change. *Journal Of Environmental Psychology*, 47, 145–154. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.05.010>.
- Astita, S. (2025). Dinamika Urbanisasi Dan Perubahan Elemen Ekistik: Studi Kasus Kota Surakarta. *Cities And Urban Development Journal*, 3(1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.7454/Cudj.V3i1.1036>.
- Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman. (2025). Wamen PKP Bersama Menteri KKP Tinjau Lokasi Rencana Penataan Kawasan Pesisir di Pulau Bungin NTB. Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Retrieve from <https://pkp.go.id/Berita/Detail/Wamen-Pkp-Bersama-Menteri-Kkp-Tinjau-Lokasi-Rencana-Penataan-Kawasan-Pesisir-Di-Pulau-Bungin-Ntb>.
- Bowmer, R., & Thiessen, M. (2024). Climate Change Destroyed An Alaska Village. Its Residents Are Starting Over In A New Town. Ap News. Retrieve from <https://apnews.com/Article/Climate-Change-Permafrost-Melting-Alaska-Newtok-Relocation-Moving-292694f057b75f75a9438c794853ee25>.
- Brilian, A. P. (2025). Kawasan Pesisir Pulau Bungin Mau Ditata, Fahri: Nelayan Akan Tinggal Di Rusun. Detikproperti. Retrieve from <https://www.detik.com/Properti/Berita/D-7787430/Kawasan-Pesisir-Pulau-Bungin-Mau-Ditata-Fahri-Nelayan-Akan-Tinggal-Di-Rusun>.
- Carone, M. T., Vennari, C., & Antronico, L. (2025). How Place Attachment In Different Landscapes Influences Resilience To Disasters: A Systematic Review. *Sustainability (Switzerland)*, 17(5), 1941. DOI: <https://doi.org/10.3390/Su17051941>.
- Doxiadis, C. A. (1968). Articles Man's Movement And His City. *Science*, 162(3851), 326–334.
- Doxiadis, C. A. (1970). Ekistics, The Science Of Human Settlements. *Science*, 170(3956), 393–404. DOI: <https://doi.org/10.1126/Science.170.3956.393>.
- Efendi, S., & Baiquni, M. (2022). Strategi Penghidupan Masyarakat Nelayan Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Retrieve from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218230>.
- Ernawati, J. (2011). Faktor-Faktor Pembentuk Identitas Suatu Tempat. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 3(2), 1–9. DOI: <https://doi.org/10.26905/lw.v3i2.1391>.
- Inalhan, G., Yang, E., & Weber, C. (2021). Place attachment theory. In A handbook of theories on designing alignment between people and the office environment (pp. 181-194). Routledge. doi: <https://doi.org/10.1201/9781003128830-16>.
- Islamiah, E. (2024). Dampak Perkembangan Permukiman Nelayan Terhadap Kualitas Prasarana Lingkungan Permukiman Di Desa Wisata Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. *Undergraduate Thesis*, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Khaerunnisa, C. (2022). Reklamasi Pesisir Pantai Di Pulau Bungin Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Dan Prespektif Fiqih Lingkungan. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kurniawan, A. (2024). Pulau Terpadat Di Dunia Ada Di Sumbawa, Namanya Pulau Bungin. RRI. Retrieve from <https://www.rri.go.id/Wisata/538271/Pulau-Terpadat-Di-Dunia-Ada-Di-Sumbawa-Namanya-Pulau-Bungin>.
- Lahamendu, V., Rengkung, M. M., & Karongkong, H. H. (2022). Pola Permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Arsitektur Daseng*, 11(1), 467-473.
- Laksono, M. Y. (2025). Permukiman Di Kawasan Pesisir Pulau Bungin Ntb Bakal Ditata. Kompas.Com. Retrieve from <https://www.kompas.com/Properti/Read/2025/02/20/153000821/Permukiman-Di-Kawasan-Pesisir-Pulau-Bungin-Ntb-Bakal-Ditata>.
- Li, J., Koohsari, M. J., Kaczynski, A. T., Tanimoto, R., Watanabe, R., Nakaya, T., Luo, Y., Zhao, J., Yasunaga, A., Oka, K., & Hanibuchi, T. (2025). The Built Environment And Place Attachment: Insights From Japanese Cities. *Preventive Medicine Reports*, 50, 102969. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2025.102969>.
- Manzo, L. C., & Perkins, D. D. (2006). Finding Common Ground: The Importance Of Place Attachment To Community Participation And Planning. *Journal Of Planning Literature*, 20(4), 335–350. DOI: <https://doi.org/10.1177/0885412205286160>.
- Marjanto, D. K., & Syaifuddin, S. (2013). Potensi Budaya Masyarakat Bajo di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa. *Patanjala*, 5(3), 387-402.
- Marliana, D., Sarwono, & Rozikin, M. (2021). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development Di Kabupaten Sampang (Studi Pada Bappeda Kabupaten Sampang). *Jurnal Administrasi*

- Publik*, 1(3), 80–86.
- Mulyan, A. (2020). Proses Pengembangan Suku Bajo Di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), 67–82.
- Nurmawanti, N., & Rahman, A. (2024). Status Penguasaan Tanah Reklamasi Untuk Pemukiman Penduduk Lokal Studi Di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. *Private Law*, 4(3), 850-859.
- Pan, Y., & Cobbinah, P. B. (2023). Embedding place attachment: Residents' lived experiences of urban regeneration in Zhuanghe, China. *Habitat International*, 135, 102796. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102796>.
- Pattaray, A., Ratmaja, L., Sirajuddin, & Pidada, I. A. Y. S. D. U. (2024). Optimalisasi Potensi Wisata Pulau Bungin Melalui Pengembangan Paket Wisata Terintegrasi Berbasis Budaya Dan Komunitas. *JPPNU: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara*, 6(2), 230–246.
- Peng, J., Strijker, D., & Wu, Q. (2020). Place Identity: How Far Have We Come In Exploring Its Meanings? *Frontiers In Psychology*, 11(March), 1–19. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00294>.
- Poedjowibowo, D. (2016). Permukiman Suku Bajo Di Desa Tumbak. *Jurnal Arsitektur Daseng Unsrat Manado*, 5(2), 59–67.
- Pratikto, W. A. (2003). Kebijakan Penataan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. *Alami*, 8(3), 1–7.
- Proshansky, H. M. (1978). The City And Self-Identity. *Environment And Behavior*, 10(2), 147–169. DOI: <https://doi.org/10.1177/0013916578102002>.
- Pulau Sumbawa News. (2025). Pulau Bungin Menuju Kampung Nelayan Modern, Menteri Kp Dan Wamen Pkp Dukung Transformasi Pesisir. Pulau Sumbawa News. Retrieve from <https://pulausumbawanews.net/2025/02/20/pulau-bungin-menuju-kampung-nelayan-modern-menteri-kp-dan-wamen-ppk-dukung-transformasi-pesisir/>.
- Rahmat, & Usman, K. (2016). Islamisasi Suku Bajo Di Bima. *Rihlah*, 5(2), 23–37.
- Saputra, P. A. H. E., Sasongko, W., & Parlindungan, J. (2022). Hubungan Kualitas Ruang Publik Terhadap Terbentuknya Keterikatan Tempat Di Kawasan Perkantoran Terpadu Kota Batu. *Planning For Urban Region And Environment Journal (Pure)*, 11(1), 19–30.
- Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining Place Attachment: A Tripartite Organizing Framework. *Journal Of Environmental Psychology*, 30(1), 1–10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006>.
- Scannell, L., & Gifford, R. (2016). Place Attachment Enhances Psychological Need Satisfaction. *Environment And Behavior*, 49(4), 359–389. DOI: <https://doi.org/10.1177/0013916516637648>.
- Schwing, E., & Adams, A. (2025). Forced To Relocate By Climate Change, Alaskan Villagers Found A New Crisis. The Washington Post. Retrieve from https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2025/05/29/newtok-alaska-climate-relocation/?utm_source=chatgpt.com.
- Sera, N. K. (2025). Place Dependence Etnis Bugis Di Kampung Nelayan Oesapa Kota Kupang. Universitas Atma Jaya. Retrieve from <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34308/>.
- Suaib, & Zulhijjah, A. N. (2024). *Pembangunan Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat* (D. Ari & A. Farids (Eds.)). Intelgensia Media (Intrans Publishing Group).
- Taufiqurrahman, & Ali, I. (2023). Konsep Pikir Masyarakat Pulau Bungin Tentang Migrasi Penduduk. Seminar Nasional LPPM Ummat, 854.
- Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Place And Identity Processes. *Journal Of Environmental Psychology*, 16(3), 205–220. DOI: <https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0017>.
- Utami, W. (2021). Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Pesisir Rawan Tsunami (Studi Pesisir Aceh, Banten Dan Palu). *Tataloka*, 23(4), 479–495. DOI: <https://doi.org/10.14710/Tataloka.23.4.479-495>.
- Utari, A., Fanani, F., & P, A. Y. E. (2024). Karakteristik Lingkungan Permukiman Pesisir Suku Bajo di Pulau Bungin dan Pulau Kaung NTB. *Matra*, 5(1), 75–85.
- Warsito. (2015). Antropologi Budaya. Ombak.
- Widodo, E., Pramitasari, D., & Marcillia, S. R. (2019). Place Attachment Abdi Dan Masyarakat Terhadap Puri Ubud Di Kabupaten Gianyar, Bali. *Nature: National Academic Journal Of Architecture*, 6(2), 162-176. DOI: <https://doi.org/10.24252/Nature.V6i2a6>.
- Wulandari, A., Setioko, B., & Suprpti, A. (2016). Pengaruh Sosial Budaya Islami Terhadap Tatanan Permukiman Kampung Arab Sugihwaras. *Teknik*, 37(1), 7–16.
- Yee, M., Piggott-Mckellar, A. E., Mcmichael, C., & Mcnamara, K. E. (2022). Climate Change, Voluntary Immobility, And Place-Belongingness: Insights From Togoru, Fiji. *Climate*, 10(3), 46. DOI: <https://doi.org/10.3390/cli10030046>.